

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis penelitian terdahulu ini adalah kuantitatif deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan oleh M-S Khoirul Imami Sitorus (2023) dengan judul: Analisis Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kepuasan Petani di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji secara parsial menunjukkan Jumlah Pupuk, Harga Pupuk Subsidi, dan Waktu Penyaluran Pupuk memiliki pengaruh terhadap kepuasan petani hal ini dikarenakan nilai  $\text{sig} < 0.05$ , Tempat Penyaluran tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan petani hal ini menunjukkan jika petani tidak mendapatkan pupuk subsidi mereka akan mencari alternatif lain, Nilai R Square sebesar 0.543 atau 54.3% artinya dalam penelitian ini jumlah pupuk, harga pupuk subsidi, tempat penyaluran, waktu penyaluran pupuk memberikan kontribusi sebesar 54.3% terhadap kepuasan petani.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi memiliki potensi efektivitas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selama indikator yang digunakan dalam penelitian semuanya terpenuhi. dalam satu tahun rata-rata setiap petani muslim di desa Jetak Kidul dapat menghemat biaya mencapai Rp dengan membeli pupuk UREA

bersubsidi dan Rp.5.240.860 dengan membeli pupuk NPK bersubsidi. Dari hasil penelitian Ikhlas (2022) dengan judul: Efektivitas Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Petani Muslim di Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi dapat sangat membantu dalam peningkatan perekonomian petani muslim di desa Jetak Kidul

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adiraputra & Supyandi (2021), dengan judul: Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di Desa Sukaasih tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan percepatan dan mitigasi hambatan implementasi kartu tani di daerah dapat menjadi solusi agar subsidi pupuk dapat efektif. Kebijakan subsidi pupuk di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi jika ditinjau dari empat indikator dapat disimpulkan tidak berjalan efektif karena petani membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan harga yang lebih tinggi.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode fenomenologi dilakukan oleh Utami, Charjin, Nirmala, & Yatalathov (2022) dengan judul: Persepsi Petani Jagung Terhadap Program Kartu Tani Di Kelurahan Jumerto Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petani jagung mengetahui bahwa program Kartu Tani bermanfaat untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Petani

tidak mengetahui manfaat lain dari Kartu Tani, seperti untuk tabungan, pinjaman dan transfer dana. Petani jagung puas dengan program kartu tani. Namun, kepuasan tersebut tidak bisa dirasakan oleh petani tua. Petani jagung mengharapkan kemudahan dalam penggunaan kartu tani sehingga lebih tepat sasaran dan kontrol harga pupuk

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik melalui uji korelasi rank spearman, yaitu penelitian yang dilakukan Taufiq Hidayat Zein Fazri (2022), dengan judul: Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani (Studi Kasus pada Petani Padi di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kartu tani berdasarkan ketepatan program dan pemanfaatan program berada pada kategori tinggi sedangkan berdasarkan kemudahan program berada kategori rendah serta persepsi petani berada dalam kategori tinggi. Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi petani terhadap penggunaan kartu tani.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis tabulasi silang dan metode analisis *chi square*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ronal Kurniawan (2024) dengan judul: Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani Pada Pupuk Bersubsidi di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan 61,39% persepsi menyatakan kartu tani mudah digunakan dan 38,61% persepsi menyatakan kartu tani tidak mudah digunakan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Persepsi

Salah satu teori yang mendukung persepsi masyarakat atau petani adalah teori sosiologi. Teori ini dicetuskan oleh Schmitt yang mana teori ini mengatakan bahwa persepsi merupakan salah satu penentu tindakan seseorang atau kelompok orang ketika berinteraksi dengan sesuatu diluar dirinya. Teori sosiologi juga mengatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, yang dimana diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun pengalaman, serta penafsiran unik terhadap suatu situasi, bukan merupakan suatu pencatatan yang sebenarnya dari situasi tersebut, (Yunita, 2017:19).

Persepsi adalah proses seseorang dalam mengenali dan menafsirkan informasi guna untuk memberikan pemahaman tentang orang lain, objek maupun kejadian yang pernah dialaminya (Adam, 2016). Persepsi merupakan pengalaman yang terbentuk sepanjang proses-proses dalam pembelajaran serta pemikiran yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu, sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya (Theresia et al., 2016). Persepsi berlangsung ketika seseorang merangsang stimulus dari luar yang ditangkap menggunakan alat pengindraan yang didalamnya mengandung suatu proses dalam diri seseorang untuk mengetahui dan mengevaluasi terhadap lingkungan

sekitar, sehingga cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.

Terbentuknya persepsi seseorang pasti melalui syarat, ketentuan dan tahapan tertentu sehingga dapat meramalkan baik tidaknya sesuatu yang dilihat. Syarat terjadinya persepsi yaitu adanya objek yang dipersepsi, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi, adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus, dan adanya saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon (Sudrajat, 2020).

Proses terbentuknya persepsi didasari pada tiga tahapan. Pertama yaitu stimulus atau rangsangan, terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. Kedua yaitu registrasi, dalam proses registrasi suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. Ketiga yaitu interpretasi yang merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang (Wahyudi, 2018).

Terdapat dua macam persepsi, yaitu *External Perception* dan *Self Perception*. *External Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu, sedangkan *Self Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu (Imron, 2022). Adapun prinsip-prinsip persepsi dalam pendapat Sodikin (2015) diantaranya yaitu:

- a. Persepsi dalam pengamatan manusia terhadap seseorang, obyek atau kejadian yang berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalunya.
- b. Persepsi bersifat selektif, yaitu setiap manusia perlu selektif dalam mendapatkan rangsangan yang dianggap penting.
- c. Persepsi bersifat dugaan, yaitu terjadi ketika data yang diperoleh mengenai obyek lewat penginderaan tidak pernah lengkap.
- d. Persepsi bersifat evaluatif, yaitu persepsi yang masih diragukan dengan realitas yang sebenarnya perlu dilakukan evaluasi dengan seksama untuk mengetahui kebenarannya.
- e. Persepsi bersifat kontekstual, yaitu pengaruh paling kuat dalam mempersepsi suatu obyek. Hal ini karena ketika melihat seseorang, suatu obyek atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif dengan melihat kemiripan atau kedekatan, kelengkapan, dan kecenderungan mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian yang terdiri dari struktur dan latar belakangnya

Faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan persepsi seseorang ada tiga, yaitu faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*) (Ananda, 2019). Selain itu, karakteristik petani juga menjadi faktor penting, yang meliputi usia, pendidikan, pengalaman berusahatani, dan luas lahan yang dimiliki petani serta keaktifan petani dalam kelompok (Habtemariam et al., 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dari dalam diri seseorang yang meliputi perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi (Imron, 2022).

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dari luar diri seseorang yang meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek (Imron, 2022).

## 2.2.2 Kebijakan Subsidi Pupuk

### 1. Pengertian Kebijakan Subsidi Pupuk

Subsidi menurut Nini, Syahyana, dan Rafnel (2019) adalah bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan meringankan beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang diterima masyarakat dalam kegiatan transaksi baik barang ataupun jasa yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang. Kebijakan subsidi pupuk sendiri menurut Ikmal (2020); Sri (2016); serta Rini dan Anto (2016) adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang ditargetkan untuk petani, dengan melakukan penetapan HET sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk usahatani berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat dan dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya.

Kebijakan subsidi pupuk bukan satu-satunya kebijakan yang dilakukan pemerintah, kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan produktivitas padi secara nasional adalah penggunaan massal varietas unggul, subsidi pada berbagai input produksi, serta penerapan teknologi pertanian (M. Radinal, dkk, 2020). Kebijakan subsidi pupuk secara historis bersifat dinamis disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis. Tetapi, tujuan keberadaan kebijakan ini sejak tahun 1969 tetaplah sama, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani (Ramlayana, Ansari, & Sudarmi, 2020).

Kebijakan subsidi pupuk ini dijalankan pemerintah dengan beberapa tujuan, yang diarahkan untuk sektor pertanian. Menurut Ramlayana, Ansari, & Sudarmi (2020) tujuan dari kebijakan subsidi pupuk ini adalah untuk (1) mempermudah petani mendapatkan pupuk yang jumlahnya sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; (2) meningkatkan pendapatan petani dan meringankan biaya dalam menjalankan usahatani; dan (3) meningkatkan produktivitas, dan produksi pertanian, sehingga dapat mencapai target swasembada, dan kedaulatan pangan nasional. Dalam menjalankan pengadaan dan penyaluran subsidi pupuk, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Menteri memilih PT. Pupuk Indonesia (persero) untuk menjalankan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang ditujukan untuk kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (persero).

Penyaluran dilakukan melalui produsen (Lini II), distributor (Lini III), dan pengecer resmi (Lini IV) di wilayah tanggung jawab masing-masing. Penyaluran langsung kepada petani dilaksanakan oleh pengecer resmi dengan data cetak e-RDKK sebagai dasar yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). E-RDKK adalah sistem pendataan petani yang menerima subsidi pupuk dan RDKK yang berupa web-base berbasis Nomor Induk Kependudukan, kelanjutan dari penggunaan e-RDKK adalah diadakannya

penggunaan Kartu Tani untuk penebusan subsidi pupuk untuk masing-masing petani. Penggunaan Kartu Tani ini adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas saat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan sebagai tindakan atas rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian Nomor 1/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.

## 2. Tujuan Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan subsidi pupuk ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan beberapa sasaran yang menyoar sektor pertanian. Menurut Sri (2018), tujuan dari kebijakan subsidi pupuk ini adalah:

- a. Agar petani menerima dosis pupuk seimbang yang setara dengan yang direkomendasikan di lokasi mereka; Tujuannya agar mungkin untuk mendapatkan jumlah pupuk yang sama.
- b. Meningkatkan pendapatan petanidan mengurangi biaya pengelolaan usahatani.
- c. Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian sehingga tujuan swasembada dankedaulatan pangan nasional dapat tercapai.

## 3. Dampak Positif Kebijakan Subsidi Pupuk

Rasio antara harga *input* terhadap harga *output* secara teoritis dapat berpengaruh terhadap penggunaan input yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan laba usahatani yang diperoleh oleh petani.

Penurunan rasio harga, yang berarti harga input menjadi relatif lebih murah terhadap harga output, akan mendorong petani menggunakan input lebih banyak sehingga dapat meningkatkan produksi dan laba usahatani. Sebaliknya, adanya peningkatan rasio harga, yang berarti harga input menjadi relatif lebih mahal terhadap harga output, akan mendorong petani menggunakan input lebih sedikit sehingga dapat menurunkan produksi dan laba usahatani yang diperoleh oleh petani.

Subsidi pupuk erat kaitannya dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, sehingga dengan adanya pemberian pupuk bersubsidi berpengaruh terhadap pendapatan usahatani. Pengurangan jumlah subsidi pupuk yang diberikan akan menambah biaya produksi sehingga pendapatan petani akan menurun. Sebaliknya, bila subsidi pupuk yang diberikan bertambah, maka akan mengurangi biaya produksi petani sehingga pendapatan petani akan meningkat (Setyawati dan Yasa, 2018)

Kebijakan subsidi pupuk diharapkan mampu meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani melalui peningkatan produktivitas padi sawah dan penurunan biaya produksi. Peningkatan pendapatan juga diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi oleh petani padi. Distribusi pendapatan usahatani padi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima oleh petani padi. Pendapatan yang diterima oleh petani padi umumnya bervariasi. Semakin besar selisih pendapatan yang diterima oleh masing-masing petani padi maka semakin besar pula ketimpangan atau

ketidakmerataan distribusi pendapatan usahatani padi. Distribusi pendapatan antara petani yang memiliki dan memperoleh kesempatan yang lebih besar yang terdiri dari modal, keterampilan, lahan garapan dan tenaga kerja akan memperoleh pembagian pendapatan yang lebih tinggi daripada petani yang kurang memperoleh kesempatan (Hartati, 2020).

#### 4. Dampak Negatif Kebijakan Subsidi Pupuk

Setelah berjalan lebih dari empat dasawarsa, subsidi pupuk ternyata menimbulkan dampak negatif baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif yang cukup menonjol adalah :

- a. Dualisme pasar
- b. Penggunaan pupuk berlebihan
- c. Industri pupuk tidak berkembang secara optimal, dan
- d. Biaya lebih besar dari manfaat.

Dampak negatif yang pertama adalah subsidi pupuk menimbulkan dua jenis dualism pasar, yaitu:

- a. Dualisme antara pasar pupuk bersubsidi dengan HET dan pasar pupuk nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar, dan
- b. Dualisme antara pasar domestik dan pasar internasional.

Dualisme pasar antara pupuk bersubsididan nonsubsidi menimbulkan disparitas harga yang cukup besar antara HET dan harga pasar. Pada tahun 2006, harga HET pupuk urea adalah Rp1.200/kg, padahal harga pupuk nonsubsidi mencapai Rp5.500/kg. Hal ini mendorong terjadinya penyimpangan, yaitu pupuk bersubsidi dijual ke pasar nonsubsidi yang

meliputi perusahaan perkebunan atau petani nonpangan (Hartati, 2020). Kebijakan subsidi pupuk juga menimbulkan dualisme pasar antara pasar domestik dan pasar internasional. Disparitas harga yang tinggi antara harga di pasar domestik dan di pasar internasional mendorong terjadinya penyelundupan atau ekspor secara ilegal. Pada tahun 2008, disparitas harga antara harga domestik dan pasar internasional bahkan di atas 300%, sehingga mendorong terjadinya kelangkaan pupuk di dalam negeri (Setyawati dan Yasa, 2018).

